

Masih Ada Warga di Jakpus dalam Kondisi Stunting

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat menemukan warga di 10 kelurahan di Jakarta Pusat masuk dalam kategori stunting atau kekurangan gizi. Puluh ikan pun diberikan kepada warga yang masuk dalam kategori gizi buruk itu.

Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma, saat ditemui di acara panen ikan di Sawah Besar, mengatakan, di wilayahnya masih ada warga yang masuk dalam kategori stunting. Warga tersebut tersebar di 10 dari 44 kelurahan di Jakarta Pusat. “Berdasarkan hasil survei ada 10 kelurahan yang ini menjadi prioritas kita dalam penanganan stunting. Ini menjadi perhatian serius bagi kami, makanya kita perlu lakukan pendataan ibu hamil, maupun kelompok usia anak,” ucap Dhany Sukma, Rabu (6/10).

Dhany mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah dalam mengatasi stunting di wilayahnya. Seperti pemberian penambahan makanan bergizi berupa ikan dari panen yang dilakukan

Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat.

“Seperti hari ini kita panen ikan, semua ikan ini kita berikan kepada warga yang masuk dalam kategori stunting,” ucapnya.

Dhany menjelaskan ada 35 kilogram ikan yang dipanen di embung di Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, akan diberikan ke warga. Embung ini juga sebagai bentuk kolam gizi. “Di permukiman warga juga ada kolam gizi tapi ukurannya lebih kecil. Jenis ikan yang biasa di panen yakni nila, bawal, mujair, dan lele,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Pusat, Penty Yunesi Pudyastuti mengatakan hasil panen ikan memang ditujukan kepada warga yang masuk dalam stunting. Seperti warga di Kelurahan Mangga Dua Selatan yang masuk kategori stunting. “Seperti di kelurahan MDS. Kita harap dengan pemberian ikan ini dapat menurunkan laju stunting,” pungkasnya. ● yan

4 Metropolis

IDN/ANTARA



TARGET PENGOLAHAN SAMPAH MANDIRI DI JAKARTA

Warga menimbang sampah di Bank Sampah Durian 3 RT 3 RW 8, Kebagusan, Jakarta, Rabu (6/10). Pemrov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 1.369 Rukun Warga (RW) di Ibu Kota mampu mengelola sampah secara mandiri dengan cara mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dari sumbernya mulai akhir Oktober 2021.

Kendalikan Pengambilan Air Tanah, Pemrov DKI Bangun Banyak SPAM

Upaya pencegahan pengambilan air tanah perlu dilakukan untuk menahan laju penurunan muka tanah Jakarta. Karenanya, Pemrov DKI bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun beberapa sistem penyediaan air minum (SPAM).

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya serius dalam mengendalikan pengambilan air tanah oleh masyarakat. Upaya pencegahan pengambilan air tanah perlu dilakukan untuk menahan laju penurunan muka tanah Jakarta.

Saat ini, Pemprov DKI belum bisa melarang warga untuk menggunakan air tanah karena distribusi jaringan pipa air bersih baru 62%. Pria yang akrab

disapa Ariza itu menjelaskan, guna memenuhi kebutuhan air bersih warga Jakarta dari program perpipaan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun beberapa sistem penyediaan air minum (SPAM).

“Penurunan air tanah di Jakarta ini memang di bawah permukaan laut. Kita PAM hanya bisa mencapai 62%, sisanya masyarakat masih

mengambil dari pompa, jet-pump, dan sebagainya. Namun demikian kami sudah menyiapkan dengan PUPR dari Karian Serpong, Jatiluhur, serta Juanda untuk ke depan agar bisa menyalurkan kebutuhan air bersih di DKI Jakarta,” ungkap Ariza di Balai Kota, Selasa (5/10) malam.

Dengan menyeluruhnya program pipa air bersih, pengambilan air tanah akan berkurang maksimal serta berdampak terhadap minimnya penurunan muka tanah. Penurunan muka tanah ini jika dibiarkan akan berimbas pada tenggelamnya daratan Jakarta khususnya di pesisir pantai. “Kalau nanti sudah tersalurkan, penggunaan air tanah akan berkurang, sesuai dengan penyaluran yang ada. Jadi semakin banyak PAM Jaya menyalurkan air bersih, maka penyedotan air melalui pompa akan berkurang ya,” tuturnya.

Ia pun meminta agar warga Jakarta menghemat penggunaan air. Meskipun di Jakarta belum terjadi kekeringan air seperti di beberapa wilayah di Pulau Jawa tiap musim kemarau, namun warga harus tetap berkontribusi pada menjaga lingkungan hidup.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Yusmada Faizal menjelaskan pihaknya belum sampai pada tahap melarang total penduduk Jakarta untuk menggunakan air tanah. Terlebih karena cakupan air perpipaan Jakarta baru mencapai 62%. Namun, pihaknya memang berupaya mengendalikan pengambilan air tanah sebagai upaya menahan laju penurunan muka tanah.

“Makanya sudah diatur di Perda 10/1998 itu memulai melakukan pengendalian air tanah dengan mekanisme pajak air tanah. Itu kan dalam kerangka kita mengontrol air tanah terutama air tanah dalam yang komersial. Kalau yang di rumah-rumah masih ini air tanah masih dipakai. Misalnya di selatan kalau misalnya distop ya air pipanya saja belum,” kata Yusmada dalam rapat bersama

Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/10).

Guna pengendalian tersebut saat ini untuk pengambilan air tanah harus melalui rekomendasi dari Balai Konservasi Air Tanah dan mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI. “Tapi harapan besar kita memang nanti memang kalau ada kesepakatan kita dengan kementerian untuk menggunakan air baku dari SPAM Jatiluhur 2 Serpong dari Barat-Juand. Kalau itu terpenuhi itu rencananya tahun 2024 baru selesai 3 tahun kemudian. 2030 nanti dijelaskan lagi,” tuturnya.

Namun, ia tidak menampik sebagai upaya menahan laju penurunan muka tanah. “Makanya sudah diatur di Perda 10/1998 itu memulai melakukan pengendalian air tanah dengan mekanisme pajak air tanah. Itu kan dalam kerangka kita mengontrol air tanah terutama air tanah dalam yang komersial. Kalau yang di rumah-rumah masih ini air tanah masih dipakai. Misalnya di selatan kalau misalnya distop ya air pipanya saja belum,” kata Yusmada dalam rapat bersama



IDN/ANTARA

NORMALISASI KALI MUKEVART

Sejumlah alat berat melakukan pengorekan sampah dan sedimen lumpur di Kali Mukevart Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu (6/9). Pengerukan yang dilakukan pemerintah Pemrov DKI Jakarta bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan banjir untuk wilayah Jakarta dan Tangerang saat musim hujan tiba.

Pilih ke Bali Ketimbang Paripurna DPRD, Anies Dinilai tak Jelas

JAKARTA (IM) - Anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memilih untuk ke Bali menghadiri workshop Partai Amanat Nasional (PAN) ketimbang rapat paripurna reses DPRD DKI yang digelar bersama pada Senin (4/10) kemarin. Yuke menjelaskan, paripurna yang digelar bersamaan dengan workshop PAN di Bali itu merupakan Rapat Paripurna tentang penyampaian hasil reses DPRD DKI yang berisi serapan aspirasi masyarakat. Politikus PDI Perjuangan itu pun menilai sikap Gubernur Anies semakin tidak jelas dalam menjalankan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Di mana membutuhkan kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam menjalan-

an kebijakannya.

“Acara partai di luar daerah kan bisa menggunakan virtual, karena ada agenda penting di Jakarta. Ke Papua saja beliau tidak hadir dan memilih virtual,” kata Yuke dalam keterangan tertulis, Rabu (6/10). Eksekutif dan Legislatif memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan di era demokrasi saat ini. Dia berharap, di tahun terakhir kepemimpinannya, Gubernur Anies mampu menjalankan janji-janji kampanyenya yang hingga saat ini hanya sebatas seremonial.

Misalnya saja rumah DP Rp0, Ok Oce ataupun naturalisasi yang belum juga terwujud. “Gubernur Anies tidak punya niat baik untuk menjalankan pembangunan di Jakarta. Legislatif sebagai mitra pemerintahannya saja tidak dihargai. Di mana membutuhkan kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam menjalan-

Sekitar 4 Ribu Warga Depok Masih Buang Air Besar Sembarangan

DEPOK (IM) - Kota Depok belum terbebas dari perilaku warga yang buang air besar sembarangan (BABS). Buktiannya, dari 63 Kelurahan, baru 34 Kelurahan yang sudah mendeklarasikan bebas dari BABS atau open defecation free (ODF).

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Depok, Indra Kusuma mengatakan saat ini ada 29 kelurahan yang belum bebas BABS. “Ada 4.000 warga dari 29 kelurahan di Kota Depok yang masih BABS seperti di kali, saluran air, situ dan kebun,” katanya Rabu (6/10).

Menurut dia, perilaku BABS, bukan semata-mata karena warga tak memiliki jamban di rumahnya. Namun, hal itu dipengaruhi kebiasaan yang belum sepenuhnya bisa diubah. Dia mencontohkan, warga yang tinggal dekat aliran kali masih ada yang terbiasa buang air besar di sungai. “Padahal, di rumah mereka sudah ada jamban. Namun, mereka lebih memilih BAB di kali,” katanya.

Camat Cilodong, Kota Depok Supomo mengakui di daerah kecamatannya masih terdapat sejumlah warga yang BABS. Warga yang BABS umumnya yang rumahnya berada di daerah pedalaman.

“Di daerah pedalaman biasanya ditemukan BABS. Kalau perkotaan kemungkinannya kecil,” katanya Rabu (6/10).

Ia menuturkan, pihaknya bersama Dinas Kesehatan melalui petugas di puskesmas setempat terus memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai dampak BABS. Sebab, perilaku tersebut rentan menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare.

Supomo mengungkapkan, permukiman yang belum bebas dari BABS itu tersebar di sejumlah perkampungan yang ada dekat aliran kali, menjadi perhatian pihaknya untuk diberikan sosialisasi. Ada sejumlah perkampungan di Kecamatan Cilodong yang terus kami bina dan diberi penyuluhan tentang bahaya BABS. Dia menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok untuk menyediakan fasilitas MCK, jamban, dan septik tank. Pengadaan berbagai fasilitas ini juga mendukung terwujudnya daerah bebas BABS. Sebab, kuman yang dibuang akan mengalir bersama kotoran melalui air. Bahayanya, jika air yang sudah terkontaminasi itu digunakan masyarakat, maka kumannya pun rentan juga menular. Penyebab penularan diare dari air yang tercemar pembuangan air besar atau hajat itu dikarenakan adanya bakteri ekologi. ● yan

Dinkes DKI Telusuri Bidan Lecehkan Bumil di Puskesmas Jakbar

JAKARTA (IM) - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menelusuri kebenaran informasi mengenai bidan di salah satu puskesmas yang diduga melecehkan seorang ibu hamil (bumil) yang hendak melahirkan. Peristiwa itu diduga terjadi di salah satu puskesmas di Jakarta Barat (Jakbar).

“Tim kami sedang turun lapangan untuk telusur dan konfirmasi terhadap fakta lapangan yang terjadi,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes DKI Jakarta, Purwadi kepada wartawan, Rabu (6/10).

Purwadi mengatakan saat ini tim dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat sudah bergerak ke lapangan. Dinkes DKI pun memastikan akan memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan tersebut jika informasi yang viral di media sosial itu terbukti adanya.

“Kami nanti menunggu segera laporan dari teman-teman Suku Dinas Kesehatan yang sedang turun ke lapan-

gan. Pastinya kami dalam koridor pembinaan terhadap tenaga kesehatan tetap akan melakukan penegakan disiplin pegawai, termasuk kepada tenaga kesehatan dengan standar kompetensi yang ada, termasuk terkait dengan aspek etikanya. Nah, aspek etik ini tentunya nanti kami juga akan melibatkan profesi-profesi dalam hal pembinaan, termasuk sanksinya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada,” tuturnya.

Purwadi melanjutkan, jika terbukti melakukan pelecehan verbal, sanksi akan diberikan tanpa memandang status kepegawaian tenaga kesehatan tersebut.

Dia mengungkapkan sanksi tersebut ialah pencabutan surat tanda registrasi (STR) sementara.

Diberitakan sebelumnya, heboh di media sosial informasi mengenai seorang ibu hamil yang diduga dilecehkan secara verbal oleh bidan. Dari informasi yang beredar itu menyebutkan pelecehan itu

dilakukan oleh sejumlah bidan di salah satu puskesmas di Jakarta Barat.

Para bidan itu disebut mengejek kondisi keputihan ibu hamil yang tengah kesakitan karena menjelang proses melahirkan itu. Informasi itu disampaikan oleh saudara sang ibu hamil.

“Dan membuat saya sangat marah adalah ketika saat mereka mengecek pembuluh bumil, lalu dia mengatakan ‘keputihannya banyak banget’, lalu bidan tersebut ada yang menjawab, ‘Ih, JORSE!’ demikian potongan pengakuan @stevfanywijaya yang heboh direspon banyak netizen di TikTok, dikutip detikcom atas izin yang bersangkutan.

Kondisi sang ibu hamil yang datang tanpa didampingi suami untuk memeriksa kehamilan juga dipermasalahkan. Bahkan para bidan itu disebut menyampaikan sang ibu hamil tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan jika tidak didampingi suami. ● yan

Kadisdik Pastikan 95 Persen Guru Telah Tervaksinasi

KOTA BEKASI (IM) - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, Dr. Inayatullah memastikan 95 persen guru yang mengajar saat pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sudah mengikuti program vaksinasi Covid-19 dari pemerintah.

Mereka, sambungnya, telah divaksin dan dipastikan siap menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas.

“Alhamdulillah berdasarkan data 95 persen guru, dan tenaga pendidik sudah tervaksinasi, adapun yang sebagian mereka komorbid,” kata Inayatullah dalam siaran pers Humas Pemkot Bekasi, Rabu (6/10).

Selain guru yang sudah divaksin, Inayatullah memastikan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan juga dipastikan telah tervaksinasi.

“Pegawai di dinas juga telah mengikuti vaksinasi,”

tambahnya. Bukan hanya itu, Dinas Pendidikan Kota Bekasi juga telah melakukan verifikasi terhadap 611 Sekolah Dasar (SD) dan 139 Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Dinas Pendidikan.

“Pada tahap pertama ada 611 untuk SD dan 139 SMP yang telah kami verifikasi dan lolos,” kata Inayatullah.

Meski telah dinyatakan lolos oleh Dinas Pendidikan, pihaknya menyatakan melakukan evaluasi berjenjang dan pengawasan yang sangat ketat.

“Kami melakukan evaluasi berjenjang dan pengawasan sangat ketat, sekolah juga wajib membuat laporan serta bekerjasama dengan unsur 4 pilar, supaya PTM terbatas ini dapat berjalan dengan baik,” papar Inayatullah.

Dia berharap, PTM yang sedang berlangsung bisa ber-



FOTO : HUMAS PEMKOT BEKASI

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah (dua kiri) saat meninjau pembelajaran tatap muka (PTM) di salah satu sekolah, Rabu (6/10).

jalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan.

Inayatullah menambahkan, maksimal kapasitas siswa per kelas adalah 50 persen, kemu-

dian durasi belajar juga dibatasi dan siswa harus mendapatkan persetujuan dari orangtua. ● mdl